



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN

MS II Tahun Sidang 2021-2022

(27 November – 10 Desember 2021)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

for by

DAFTAR ISI

KOMISI II	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
KOMISI III	4
A. FUNGSI LEGISLASI	4
B. FUNGSI ANGGARAN	5
C. FUNGSI PENGAWASAN	6
KOMISI IV	8
A. FUNGSI LEGISLASI	8
B. FUNGSI ANGGARAN	8
C. FUNGSI PENGAWASAN	9
KOMISI V	13
A. FUNGSI LEGISLASI	13
B. FUNGSI ANGGARAN	14
C. FUNGSI PENGAWASAN	14

KOMISI VI	16
A. FUNGSI LEGISLASI	16
B. FUNGSI ANGGARAN	16
C. FUNGSI PENGAWASAN	16
KOMISI VII	22
A. FUNGSI LEGISLASI	22
B. FUNGSI ANGGARAN	22
C. FUNGSI PENGAWASAN	22
KOMISI VIII	24
A. FUNGSI LEGISLASI	24
B. FUNGSI ANGGARAN	24
C. FUNGSI PENGAWASAN	24
D. TUGAS KHUSUS	26
KOMISI IX	27
A. FUNGSI LEGISLASI	27
B. FUNGSI ANGGARAN	27
C. FUNGSI PENGAWASAN	28

KOMISI X	42
A. FUNGSI LEGISLASI	42
B. FUNGSI ANGGARAN	43
C. FUNGSI PENGAWASAN	43
BADAN LEGISLASI	48
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	49
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	59
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	60
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	62

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bekasi	Terkait evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
2.	DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kota Surabaya	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua DPRD Kota Surabaya, terkait	1. Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kota Surabaya. Dalam RDPU tersebut, DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan aspirasi terkait pemekaran 9 Desa persiapan di

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			penyampaian profil sejarah pemekaran 9 (Sembilan) Desa Persiapan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan terkait PP 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan.	Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan DPRD Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, menyangkut Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. 2. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk segera memproses legalisasi kode desa atas 9 desa/kepenghuluan hasil pemekaran pada tahun 2012 di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, karena secara umum aturan atau regulasi bersifat non-retroaktif atau tidak boleh berlaku secara surut. 3. Terkait permintaan revisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020, Komisi II DPR RI akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara. Mengingat keluhan serupa hampir terjadi di berbagai daerah, maka Komisi II DPR RI juga mendorong

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				Anggota DPRD Kota Surabaya bersama dengan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia untuk memperjuangkan perubahan Perpres 33/2020 secara nasional sehingga kerja-kerja konstitusional anggota legislatif di berbagai daerah di Tanah Air bisa lebih optimal di masa-masa mendatang.
3.	Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kalimantan Selatan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kalimantan Selatan	Terkait masalah pertanahan dan tata ruang
4.	Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Gorontalo	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Gorontalo	Terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, selanjutnya disebut RUU tentang Kejaksaan.	- Rapat Kerja tanggal 15 November 2021 - Rapat Panja tanggal 23 sd 24 November 2021 - Rapat Timus/Timsin tanggal 2 sd 4 Desember 2021 - Rapat Kerja Tk. I tanggal 6 Desember 2021.	- Jumlah DIM sebanyak 379 DIM terdiri dari: - DIM di batang tubuh dari DIM nomor 1 sampai dengan DIM nomor 230 DIM; dan - DIM di bagian Penjelasan dari DIM Nomor 231 sampai dengan DIM nomor 379 - Jumlah DIM sebanyak 379 DIM, dengan jenis rincian yaitu: - DIM yang bersifat Tetap sebanyak 166 DIM; - DIM yang bersifat Perubahan Substansi sebanyak 65 DIM; - DIM yang bersifat Perubahan Redaksional sebanyak 74 DIM; - DIM yang Dihapus sebanyak 76 DIM; dan - DIM yang bersifat Penambahan Norma sebanyak 6 DIM. - Beberapa perubahan, penyesuaian dan penambahan	- Kunker Legislasi tanggal 29 Nov sd 1 Des 2021, ke: - Provinsi Sulteng - Provinsi Kaltim - Raker Tk. I menyetujui RUU tentang Kejaksaan disetujui untuk dibawa pada Pembahasan Tk. II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna terdekat.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			substansi yang dilakukan di Timus/Timsin dan Panitia Kerja, yakni sebagai berikut: - Ketentuan Umum - Usia Minimal Pengangkatan Jaksa - Penegasan Lembaga Pendidikan Khusus Kejaksaan - Penugasan Jaksa pada instansi lain selain pada Kejaksaan RI - Pelindungan Jaksa dan keluarganya - Perbaikan ketentuan pemberhentian Jaksa - Jaksa Agung sebagai Pengacara Negara - Jaksa Agung sebagai Kuasa Hukum Perkara MK - Perbaikan ketentuan pemberhentian Jaksa Agung - Tugas dan Wewenang Jaksa - Tugas dan wewenang Jaksa agung	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kepolisian Daerah	KUNKER SPESIFIK	Pengawasan Penegakan Hukum: 1. Pengawasan Penanganan Covid-19 2. Pemulihan Ekonomi Nasional.	1. Pelaksanaan tanggal 29 November 2021. 2. Provinsi DKI Jakarta, dipimpin oleh Bp Desmond Mahesa Djunaedi.
2.	Forum Ulama & Habaib Ahli Sunnah Wal Jamaah Indonesia	Pelanggaran HAM	Penyampaian pernyataan Sikap Forum Ulama dan Habaib Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan meminta kepada Komisi III DPR RI untuk mengawal penegakan hukum agar transparan dan tidak diskriminatif serta terhindar dari agenda terselubung kaum islamfobia yang berupaya memberi stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam dan ajaran Islam.	RDPU tanggal 6 Desember 2021, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.
3.	Aliansi Ulama Madura (AUMA)	Penyampaian beberapa amanah masyarakat	1. Penyampaian kasus Habib Rizieq Shibab dan tragedi terbunuhnya 6 (enam) orang laskar	RDPU tanggal 7 Desember 2021, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pengawal ulama dan da'i. 2. AUMA meminta agar Komisi III membentuk pansus guna menyelidiki dan mengevaluasi kasus pembunuhan dan pembantaian 6 (enam) orang laskar tersebut.	
4.	Kongres Peranserta Masyarakat Perfilman	Penyelewengan dana bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional Sub Sektor Film	KPMP memberikan informasi dan permohonan dukungan terkait dengan adanya ketidakadilan pada program Pemulhan Ekonomi Nasional (PEN) subsektor Film.	RDPU tanggal 8 Desember 2021, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.
5.	1. Kepolisian Daerah 2. Kejaksaan Tinggi	KUNKER SPESIFIK	Kunker Spesifik dalam rangka pengawasan penegakan hukum pengamanan penanganan covid-19, PEN, dan persiapan pengamanan Nataru.	Kunspek ke Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 sd 11 Desember 2021 dipimpin oleh Bp. Pangeran Khairul Saleh.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Penyampaian NA dan Konsep RUU kepada Badan Legislasi DPR RI	Penyampaian NA dan Konsep RUU yang disusun oleh Komisi IV DPR RI kepada Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 13 Eselon I b. Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Rencana Program/Kegiatan Anggaran Tahun 2022 b. Isu-isu Aktual, antara lain: - Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XIX/2021 tanggal 25 November 2021 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusi atau inkonstitusional bersyarat, khususnya pasal-pasal yang mengatur sektor Kehutanan	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Intern Panja Pengawasan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Perumusan Rekomendasi Panja Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan - Panja merekomendasikan untuk membetuk kembali Panja terkait Penindakan Penyalahgunaan Kegiatan Berusaha dalam Kawasan Hutan mulai Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, sebagai tindak lanjut rekomendasi dan pelaksanaan tugas Panja Penggunaan, Pelepasan, dan Pelepasan Kawasan Hutan	
2.	Rapat Intern Panja Pengawasan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Perumusan Rekomendasi Panja Pengembangan Sawit Rakyat - Panja merekomendasikan untuk membentuk panja baru dengan pertimbangan Panja belum mendapatkan informasi yang cukup untuk menyusun rekomendasi. Adapun Panja yang akan dibentuk tersebut fokus kepada isu/permasalahan perkebunan sawit di luar kawasan. Sedangkan untuk perkebunan sawit di dalam kawasan akan menjadi topik permasalahan tersendiri, atau menjadi bagian dari pembahasan dalam Panja yang lain.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Rapat Intern Panja Pengawasan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Membahas dan melakukan penajaman mengenai rumusan rekomendasi Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani, sebagai tindak lanjut rapat konsinyering tim perumus di Purwakarta	
4.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat - Meninjau dan berdiskusi dengan pelaksana kegiatan Restorasi Gambut di Kabupaten Kubu Raya - Meninjau dan berdiskusi dengan pelaksana kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Kabupaten Mempawah	
5.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat - Pertemuan dan diskusi di Pabrik Gula Jatitujuh mengenai Permasalahan Konflik Lahan Perkebunan Pabrik Gula Jatitujuh PT Rajawali II dengan Ditjen Planologi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Perkebunan Kementrian Pertanian, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Rajawali II, Pemeintah Kabupaten Majalengka dan Indramayu, serta Perwakilan Masyarakat Kabupaten Majalengka Indramayu	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kabupaten Bangli, Provinsi Bali - Meninjau Desa Wisata Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli - Meninjau dan berdiskusi dengan Pengelola Sampah di Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli - Meninjau dan berdiskusi dengan Yayasan Bambu Lestari selaku pegiat Pengelolaan Hutan Bambu lestari dan pengelola persemaian bambu di Kintamani, Kabupaten Bangli	
7.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur - Meninjau kawasan pengembangan komoditas jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan jagung baik untuk pangan maupun pakan, yang dilanjutkan dengan berdiskusi dengan petani dan peternak	
8.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat - Pertemuan dan diskusi di rumah dinas walikota Kota Pariaman dengan dihadiri oleh mitra kerja terkait - Mengunjungi kawasan pertanian terpadu (<i>integrated farming</i>) di desa batang tajongkek, kecamatan	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pariaman selatan dengan kegiatan sbb: a. Melakukan kegiatan penebaran benih ikan di kolam bundar b. Melakukan penanaman bersama tanaman buah - Mengunjungi dan berdiskusi di lokasi pengembangan maggot untuk ekspor di Kampung Apar, Kota Pariaman	
9.	Kunjungan Kerja Spesifik Panja sarana Prasarana dan Permasalahan Masyarakat	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja ke Kota Ambon, Provinsi Maluku - Kunjungan <i>hatchery</i> dan Pertemuan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dihadiri oleh mitra kerja terkait - Pertemuan di Unit Pengolahan Ikan PT. Harta Samudera Komplek PPN Ambon dihadiri oleh mitra kerja terkait - Kunjungan lapangan dan Pertemuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dihadiri oleh mitra kerja terkait	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Perubahan atas UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan	Tgl 29 Nov 21 Rapat Panitia Kerja	- Laporan Tim Perumus - Membahas DIM yang masih di pending	
		Tgl 1 Des 2021 Rapat Kerja	Pengambilan Keputusan pada akhir Pembicaraan Tk. I atas RUU Perubahan Atas UU. No 38 Tahun 2004 ttg. Jalan : - Pengantar Pimpinan Komisi; - Laporan Panitia Kerja RUU Perubahan Atas UU. No 38 Tahun 2004 ttg. Jalan; - Pembacaan Naskah RUU Perubahan Atas UU. No 38 Tahun 2004 ttg. Jalan; - Pendapat Akhir Mini sebagai sikap akhir Fraksi dan Presiden; - Penandatanganan Naskah RUU Perubahan Atas UU. No 38 Tahun 2004 ttg. Jalan - Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tk. II dalam Rapat Paripurna DPR RI.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Raker dgn Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kakorlantas Polri	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Membahas mengenai kesiapan Pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan penumpang angkutan Umum menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pada masa Pandemi Covid 19	
2.	Kunjungan Kerja Luar Negeri	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	ke Negara Turki dengan agenda : a. Pertemuan dengan KBRI Turki b. Pertemuan dengan <i>Turkish Contractors Association</i> (TCA) c. Pertemuan dengan Kementerian Transportasi dan Infrastruktur d. Pertemuan dengan anggota parlemen yang membidangi Transportasi dan Infrastruktur (committee on Public Works, Reconstruction, Transportation and Tourism)	-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	- Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Bekasi, Jawa Barat; - Peninjauan Pembangunan Rel ganda Stasiun Bogor - Sukabumi; Bogor. - Peninjauan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Cikande Serang	
4.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	- Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi ke Kab. Cianjur dengan melakukan pertemuan dengan Bupati Cianjur, meninjau Rest Area Gunung Mas, meninjau Safety Lane Ciloto	
5.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	- Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi ke Kota Bandung, meninjau progres revitalisasi Terminal Type A Leuwi Panjang, Bandung	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU BUMN	Konsinyering Tanggal 9-11 Desember 2021	Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN mengadakan konsinyering ketiga dalam rangka pembahasan draft RUU BUMN. Pada konsinyering kali ini, Badan Keahlian DPR RI menyampaikan draft akhir RUU BUMN yang kemudian dilanjutkan penyampaian pendapat dari tiap-tiap Poksi. Pendapat tiap poksi disampaikan secara tertulis.	Lanjutan Konsinyering 26-28 November 2021

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	PT Barata	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan kerja terkait rencana revitalisasi PT Barata, Gresik. Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI memberikan rekomendasi:	Kunjungan Kerja Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			• Fokus pada bisnis yg menguntungkan • Meningkatkan SDM • Melakukan transformasi bisnis	29 November – 1 Desember 2021.
2.	PT SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN ini menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi, yang salah satunya adalah Komisi VI DPR RI mendorong PT SIER agar keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta dapat menciptakan sebuah ekosistem perekonomian baru bagi masyarakat, khususnya di lingkungan tempat beroperasinya kawasan industri.	Kunjungan Kerja Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI. 29 November – 1 Desember 2021.
3.	Kementerian BUMN	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN membahas terkait Initial Public Offering (IPO) dan Right Issue di BUMN tahun 2021 – 2022. Rapat ini menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi, antara lain Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN dalam melaksanakan IPO dan Right Issue memperhatikan timing dan kondisi yang tepat termasuk mempertimbangkan BUMN mempunyai prospek yang baik. Selain itu Komisi VI DPR RI juga meminta kepada	Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, 2 Desember 2021

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Kementerian BUMN untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai enam BUMN yang sudah go public namun belum memiliki kinerja optimal. Terkait dengan itu Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian BUMN melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, setidaknya setahun setelah IPO dilakukan.	
4.	PT Antam., Tbk	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan PT ANTAM Tbk. Rapat Dengar Pendapat ini menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi, antara lain meminta PT ANTAM Tbk agar segera menyelesaikan proyek strategis terkait hilirisasi terutama pabrik feronikel dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) dengan menyampaikan jadwal yang jelas. Selain itu Komisi VI DPR RI juga mendorong PT ANTAM Tbk untuk segera meningkatkan cadangan stok yang saat ini sangat minim, terkait deposit nikel, emas, bauksit baik melalui eksplorasi maupun penambahan lahan (IUP).	Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Antam.
5.	PT INTI	a. Pelaksanaan Undang-Undang;	Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Panja	Kunjungan Kerja Panja Penyehatan dan

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN ke PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada tanggal 3 – 5 Desember 2021. Kunjungan Kerja Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN ke PT INTI (Persero) yang merupakan satu-satunya BUMN yang fokus pada industri manufaktur telekomunikasi ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Aria Bima. Kunjungan kerja panja Komisi VI DPR RI menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi. Diantaranya adalah Komisi VI DPR RI mendukung langkah PT PPA (Persero) dalam rangka merestrukturisasi PT INTI (Persero) melalui Divestasi Aset, serta Komisi VI DPR RI mendorong agar strategi bisnis PT INTI (Persero) kedepan lebih difokuskan pada tiga sektor industri yaitu <i>Telecommunication, Electronical Manufacturing, dan Defense Industry</i> .	Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI, 3-5 Desember 2021
6.	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI ingin mengetahui perkembangan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) terkait kinerja perusahaan, rencana terkait program scale up oleh Pemerintah, peran perusahaan dalam mendorong	Kunjungan Kerja Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI, 3-5 Desember 2021

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan ekonomi di kawasan perusahaan, Semarang, Jawa Tengah maupun perekonomian nasional. Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI memberikan rekomendasi: • Mendukung seluruh proses revitalisasi yang akan dilakukan terhadap PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) sebagai salah satu BUMN yang akan dilakukan upaya <i>scale up</i> oleh PT Danareksa (Persero). • Mendorong PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dalam upaya <i>scale up</i> harus membuka lini-lini bisnis yang baru, namun jangan <i>overlap</i> dengan UMKM dan peran swasta atau pengusaha lokal. • Berharap PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN-BUMN lainnya di Indonesia benar-benar hadir menjadi instrumen negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu caranya adalah dengan menjadi daya dorong bagi	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mendorong industri di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dapat lebih membangun ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.	
7.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan PT Danareksa (Persero)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Konsinyering Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI melakukan konsinyering dengan mengundang PT PPA (Persero) dan PT Danareksa (Persero). Selaku pemegang Surat Kuasa Khusus (SKK), PPA melakukan penanganan terhadap 20 BUMN dan 1 Anak usaha BUMN, dimana atas 9 Perusahaan (8 BUMN + 1 Anak usaha BUMN) akan dilakukan restrukturisasi melalui revitalisasi alat produksi dan pengembangan SDM, terhadap 5 BUMN akan dilakukan langkah divestasi, sementara atas 7 BUMN akan ditempuh langkah pembubaran.	Konsinyering Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI. 6-8 Desember 2021.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	EBT	Kunjungan kerja	a. Provinsi Jawa Barat Peninjauan ke PT Sundaya Indonesia di Kawasan Industri Sentul Kabupaten Bogor terkait Pemasok peralatan listrik tenaga surya) b. Provinsi Jawa Timur Peninjauan ke Pabrik Bioetanol PT Energi Agro Nusantara di Kabupaten Mojokerto c. Provinsi Sulawesi Utara Peninjauan ke PLTP Pertamina Geothermal Energi (PE) Area Lahendong di Tomohon	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Luar Negeri	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara;	ke Negara Turki dengan agenda : a. Pertemuan dengan KBRI Turki b. Pertemuan dengan Ketua Komisi TBBM (<i>The Committee on</i>	-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan pemerintah	<i>Industry, Trade, Energy, Natural Resources, Information and Technology)</i> c. Pertemuan dengan <i>Deputy Minister of Energy and Natural Resources</i> d. Pertemuan dengan <i>Deputy Minister of Industry and Technology</i> e. Pertemuan dengan Zorlu Enerji f. <i>Pertemuan Karadeniz Holding (Karadeniz Powership)</i>	
2.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Provinsi Banten Peninjauan ke PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. (CAP) di Cilegon b. Provinsi Sulawesi Utara Peninjauan ke PLTS Likukpang Kabupaten Minahasa	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	• Perkembangan Kebijakan Haji dan Umrah • Isu-isu Aktual	a. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama untuk mempersiapkan sebaik-baiknya pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19. b. Meningkatkan komunikasi dan diplomasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengenai teknis operasional ibadah umrah di masa pandemi.	Perlu komunikasi, koordinasi dan diplomasi yang intens untuk memastikan penyelenggaraan umrah dan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M dapat terlaksana dengan baik.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			c. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan khususnya dalam mengintegrasikan aplikasi Siskopatuh Kemenag dengan Peduli-Lindungi dan dengan aplikasi Tawakalna Arab Saudi. d. Segera Menyusun MoU dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M.	
2.	Kunjungan Kerja Spesifik ke perwakilan Mitra-mitra Komisi VIII DPR RI di berbagai daerah di Indonesia (Kota Bogor, Indramayu, Mataram, Garut, Cilegon dan Kupang)	a. Kebijakan mengenai pembelajaran tatap muka (PTM) di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di berbagai daerah di Indonesia; b. Implementasi bantuan sosial di tengah pandemic Covid-19; c. Kesiapsiagaan bencana di berbagai daerah rawan bencana di Indonesia	a. Kebijakan PTM yang di berbagai PTKN di Indonesia relatif berjalan baik karena dilaksanakan secara <i>hybrid/blended</i> dengan menempatkan faktor kesehatan sebagai prioritas utama. b. Bantuan sosial yang diimplementasikan pada masa pandemi Covid-19 sudah berjalan cukup	Perlu optimalisasi program dan anggaran dalam meningkatkan target atau capaian program.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			baik, tinggal meningkatkan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). c. Kesiapsiagaan bencana yang digelar menjelang akhir tahun ini diharapkan dapat meningkatkan mitigasi dan mereduksi jumlah kerugian baik jiwa maupun harta.	

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Penanggulangan bencana erupsi Gunung Semeru	Melakukan kunjungan ke lokasi erupsi Gunung Semeru untuk memastikan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dapat terlaksana dengan baik.	a. Memastikan langkah-langkah untuk merelokasi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. b. Memastikan kebutuhan hidup para pengungsi dapat dipenuhi dengan secukup-cukupnya.	Perlu dukungan moral dan finansial dari berbagai pihak untuk rehabilitasi dan merekonstruksi lokasi bencana

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Panja menugaskan tim asistensi untuk mempersiapkan pendalaman substansi RUU sesuai masukan anggota Panja.	Tidak ada kegiatan Panja	Panja akan melakukan pembahasan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan III TS 2021-2022.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian/Lembaga	Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.	Tidak ada	
2.	Badan Anggaran	a. Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga; b. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.	Tidak ada	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Tanggal 30 November sampai 2 Desember 2021	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait Pengawasan Pelaksanaan Program Percepatan Penanganan Stuntingke: 1. Kota Tangerang, Provinsi Banten. 2. Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. 3. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	- Menanggulangi permasalahan stunting dan kasus gizi buruk merupakan salah satu target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) poin kedua 'zero hunger atau nol kelaparan'. Pada tahun 2030 mendatang, Indonesia bersama negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target dunia pada 2025 untuk penurunan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> pada balita. - Peraturan Presiden No 72/2021 (Perpres 72) merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Peraturan Presiden ini untuk memperkuat kerangka kelembagaan serta intervensi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kementerian/lembaga bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan melalui penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan, peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan sumber daya manusia, sehingga upaya dalam penurunan <i>stunting</i> dapat terwujud sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.	
2.	Kunjungan Kerja Spesifik Evaluasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 ke Provinsi Sumatera Barat	Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Badung Tahun 2022 dengan Bupati Badung (diwakili Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Badung) bersama	Hasil Pembahasan Mekanis mepenetapan upah minimum kota mengacu kepada ketentuan formula upah minimum menurut PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan setelah melalui	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Tanggal 7 – 9 Desember 2021	1. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 2. Dewan Pengupahan Provinsi Bali 3. Dewan Pengupahan Kabupaten Badung 4. BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Bali Nusa Tenggara Papua (Banuspa) 5. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali 6. Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan RI 7. Direktur Bina Pengawasan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 8. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 9. APINDO Prov. Bali 10. SPSI Prov. Bali	pembahasan dengan Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 2. Penetapan UMK Kabupaten Badung Tahun 2022 relatif di terima pekerja/buruh dan akan dilaksanakan oleh perusahaan karena tingkat kepercayaan pekerja/buruh cukup tinggi kepada perwakilan pekerja yang ada di Dewan Pengupahan. 3. Kenaikan Upah Minimum Kab/kota Tahun 2022 Kab Badung mengalami kenaikan rata-rata dibawah kenaikan UMP Nasional namun tidak menimbulkan penolakan di kalangan pekerja/buruh, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Badung senantiasa mengakomodir setiap masukan pekerja/buruh dan ditindaklanjuti kepada para pengusaha, dan demikian sebaliknya..	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Kunjungan Kerja Spesifik Evaluasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 ke Provinsi Sumatera Barat Tanggal 7 – 9 Desember 2021	Pembahasan dilakukan dengan: 1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2. Asisten III Provinsi Sumatera Barat 3. Plt Kadisnakertrans Sumatera Barat 4. Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat 5. Staff Ahli Kemenaker RI Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan 6. Kordinator Bidang Pengembangan Pengupahan, Dir Hubungan Industrial dan Pengupahan, Ditjend PHI & JSK 7. Pengawas Ketenagakerjaan Ditjend Binwasnaker & K3 8. Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan 9. Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau BPJS Ketenagakeejaan	1. Gubernur Sumatera Barat telah menetapkan UMP Provinsi Sumatera Barat sebelum tanggal 21 November dan mengikuti aturan PP 36/2021 2. Adanya penolakan UMP Tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat oleh aliansi Serikat Pekerja (FSPMI, FSPTSI, SP PPI, SPI, SP BASOKA dan SP YASIGA) dengan alasan PP 36/2021 inkonstitusional seiring keluarnya putusan MK no. 91/PUU/XVIII/2020 dan telah dilakukan komunikasi dan diskusi dengan Gubernur Sumbar pada 27 November 2021 3. Serikat Buruh mengakui ada 3 perwakilannya yang masuk dalam Dewan Pengupahan Provinsi, namun keberadaannya tidak dapat menyuarakan kepentingannya. Disisi lain Dewan Pengupahan Provinsi pun mengakui tidak dapat mempengaruhi kebijakan akibat aturan PP 36/2021. Namun Staff Ahli Kementerian Tenaga	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		10. Perwakilan Serikat Pekerja SPSI 11. Perwakilan Pengusaha APINDO	Kerja menegaskan bahwa PP 36/2021 memberikan ruang Dewan Pengupahan untuk aktif membangun sistem pengupahan yang baik, layak dan berkeadilan. 4. UMP pada dasarnya memberikan rasa keadilan untuk pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun, namun pekerja yang telah bekerja puluhan tahun namun masih mendapatkan upah dengan nilai terendah UMP belum mendapatkan keadilan, perlu peran aktif pengawas tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi melakukan tindakan dan keberpihakan berkeadilan.	
4.	Tanggal 5 Desember 2021 sampai 11 Desember 2021	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR RI ke: 1. Amerika Serikat 2. Ekuador	1. Amerika Serikat Amerika Serikat yang merupakan negara dengan pelayanan kesehatan bertumpu pada sistem asuransi kesehatan pemerintah (<i>Medicare dan Medicaid</i>) dan asuransi kesehatan swasta. Pemerintah mendirikan <i>the</i>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<i>National Health Care Anti-Fraud Association (NHCAA)</i> sejak tahun 1985 dan diprakasai oleh beberapa lembaga asuransi kesehatan swasta, pemerintah federal, dan pemerintah negara bagian. NHCAA merupakan satu-satunya lembaga di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri untuk melawan <i>fraud</i> dalam bidang kesehatan. Misi dari NHCAA adalah untuk melindungi dan melayani masyarakat umum dengan meningkatkan kewaspadaan dan peningkatan kemampuan untuk deteksi, investigasi, penuntutan dan pencegahan <i>fraud</i> pelayanan kesehatan. • Di Amerika, terdapat juga <i>National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)</i>, merupakan salah satu institute Kesehatan nasional AS (NIH) yang misinya adalah	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			melakukan penelitian dan pelatihan penelitian yang ditujukan untuk memahami, mengobati, dan mencegah berbagai penyakit menular, imunologi, dan alergi yang mengancam jutaan nyawa manusia. Amerika juga memiliki Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (<i>Centers for Disease Control and Prevention</i>, disingkat CDC) adalah badan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat yang berbasis di Georgia. CDC sering dijadikan rujukan bagi dunia terutama terkait panduan Kesehatan. Badan ini berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan publik dengan menyediakan informasi Kesehatan dan mempromosikan kesehatan dengan departemen kesehatan negara dan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			organisasi lainnya. CDC memfokuskan perhatian nasional pada perkembangan dan pencegahan penyakit (terutama penyakit infeksi), kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, dan edukasi masyarakat. • Di masa pandemic COVID-19 ini, data dan statistik Johns Hopkins University (JHU) menjadi acuan utama untuk penyebaran COVID-19. Peta interaktif yang dibuat oleh Center for Systems Science and Engineering di JHU ini sangat membantu para pakar dan pemangku kebijakan. • Penyediaan layanan <i>testing</i> dan <i>tracing</i> yang berkualitas perlu dilakukan, sesuai dengan beberapa panduan internasional (US CDC dan US FDA), serta juga panduan organisasi profesi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik (PDSPATKLIN) di Indonesia, metode <i>Nucleic Acid</i>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<i>Amplification Test</i> (NAAT) dapat dilakukan untuk diagnosis dan konfirmasi kasus COVID-19. TCM Isothermal memiliki akurasi sangat tinggi (setara tes PCR) dan dapat memberikan hasil dalam waktu yang jauh lebih cepat (13 menit). Keunggulan lainnya adalah pengoperasiannya yang tidak membutuhkan tenaga kesehatan dengan keahlian khusus dan prosedur yang close system serta otomatis, sehingga dapat meminimalisir <i>human error</i>. Di samping itu, instalasi alat ini tidak membutuhkan persyaratan yang ketat seperti laboratorium tes PCR. • Metode TCM Isothermal ini juga sangat tepat digunakan bagi para pelaku perjalanan, baik domestic maupun internasional, karena memberikan hasil dalam waktu sangat cepat tetapi memiliki akurasi yang tinggi	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			sehingga memberikan diagnosa akurat mengenai kondisi para pelaku perjalanan langsung pada saat itu juga, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses untuk tes PCR karena keterbatasan laboratorium BSL-2. Salah satu produsen alat Kesehatan yang menyediakan alat dengan metode ini adalah Abbott Laboratories. Alat ini yang diberi nama ID Now Device telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) untuk penggunaan darurat. 2. Ekuador Ekuador sebelumnya mempunyai permasalahan serupa dengan Indonesia dimana anggaran kesehatan yang dialokasikan sangat kecil sehingga masyarakat tidak bisa menikmati jaminan kesehatan yang	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			merupakan hak asasi manusia. Selain itu, Ekuador juga mempunyai permasalahan terkait tenaga medis dan juga sistem pelayanankesehatan yang belum baik. • Tahun 2008, setahun setelah Correa berkuasa, konstitusi baru disetujui. Konstitusi baru ini menuntut reformasi radikal terhadap sistem kesehatan Ekuador yang neoliberal. Pasal 32 konstitusi baru itu menegaskan, “kesehatan adalah hak yang dijamin oleh negara dan pemenuhannya terkait dengan pemenuhan hak yang lain, seperti hak atas air, pangan, pendidikan, olahraga, pekerjaan, jaminan sosial, kesehatan lingkungan dan segala hal yang mempromosikan kesejahteraan.”Yang menarik, konstitusi Ekuador	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			tidak memisahkan persoalan pemenuhan hak kesehatan rakyat dengan hak-hak dasar lainnya. Artinya, hak atas kesehatan tidak hanya dimaknai bahwa rakyat harus sehat, tetapi juga sebagai bagian integral untuk mensejahterakan rakyat. Selain itu, konstitusi Ekuador juga menjelaskan, “kesehatan sebagai layanan publik harus disediakan oleh negara, swasta, lembaga otonom, komunitas serta orang-orang yang punya keahlian dalam pengobatan alternatif dan leluhur.” Artinya, sistem pengobatan tradisional maupun alternatif diakui sebagai bagian dari layanan kesehatan publik. Dengan menegaskan kesehatan sebagai layanan publik, konstitusi Ekuador telah berhasil membebaskan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			layanan kesehatan dari dekapan kekuatan pasar. • Dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, Ekuador mengikuti rekomendasi WHO, namun, meskipun didukung oleh pemerintah pusat, kota-kota utama mengelola krisis kesehatan mereka secara berbeda. Meskipun <i>the National Emergency Operations Committee</i> (COE, Spanyol) merekomendasikan isolasi sosial dan menghentikan semua mobilitas pada 16 Maret 2020, ada beberapa daerah yang memiliki kebijakan berbeda, seperti di Quito. Quito menghentikan semua kegiatan akademik tatap muka lebih awal dari rekomendasi COE, dan mengikuti pedoman mobilitas terbatas dan pertemuan massal secara ketat, mengulur waktu the Hospital	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			General del Sur de Quito (HGSQ) untuk mengembangkan pendekatan yang disebutkan di atas, yang secara efektif menurunkan keparahan transmisi Covid-19. Di rumah sakit, strategi manajemen, termasuk perubahan distribusi pasien suspek COVID-19 telah memungkinkan Ekuador menurunkan insiden infeksi Covid-19 dibandingkan daerah lain.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	29-30 November 2021 Konsinyasi Panja RUU SKN	Agenda Menyepakati hasil lobi terkait isu krusial yang di pending	- Substansi mengenai pendanaan telah ada kesepakatan. - kelembagaan KON-KOI dan pengaturan supporter masih belum ada keputusan dan akan dibawa ke uji publik
2	29-30 November 2021 Konsinyasi Panja RUU PP	Agenda Perumusan norma mengenai Pendidikan Psikologi	Panja telah menyepakati substansi pengaturan mengenai pendidikan psikologi dan mulai merumuskan sebagian normanya
3	6-8 Desember 2021	Agenda Uji Publik RUU SKN, khususnya mengenai isu krusial yang belum ada kesepakatan, yaitu kelembagaan KONI-KOI, pengaturan suporter, dan Dana langsung ke Cabor (hanya 14 cabor prioritas atau untuk semua cabor) Uji Publik dilakukan ke UNNES Semarang, UNIMED Medan, dan UNM Makasar	- Para pemangku kepentingan olahraga di daerah terdapat berbagai pandangan mengenai kelembagaan KONI-KOI antara di satukan atau tetap terpisah seperti saat ini - Mengenai pengaturan supporter secara umum setuju perlu dilakkan pengaturan

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Kemendikbudristek	26-28 November 2021 Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (pengawasan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas) ke Kota Surabaya-Jawa Timur dan Kabupaten Tebing Tinggi-Sumatera Utara	Secara umum ditemukan 1. Pekerjaan guru menjadi lebih banyak di samping tatap muka terbatas juga harus melakukan daring. 2. Waktu Belajar Terlalu Singkat, Sehingga Pembelajaran Tidak Maksimal.	
		1 Desember 2021 Raker dengan agenda realisasi APBN TA 2021	Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI agar realisasi anggaran pada APBN TA 2021 sesuai target yaitu sebesar 97,70%, dimana per 30 November 2021 realisasi anggaran baru mencapai 81.00 %, atau sebesar Rp71.418.029.108.000 dari pagu (pagu harian)	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			sebesar Rp88.170.764.703.000 dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas.	
		9 Desember 2021 RDPU Panja MBKM dengan PTS Agenda: 1. Pelaksanaan dan Evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2. Peluang, Tantangan dan Strategi Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Menjawab permasalahan Perguruan Tinggi dalam menghadapi Masa Depan 3. Kendala dan Permasalahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	1. Secara umum PTS kesulitan menerapkan MKBM, karena terkait pendanaan dan fasilitas yang ada 2. Tantangan pelaksanaan Program MBKM terdapat pada regulasi, sumber daya dan mindset pengelola Perguruan Tinggi (PT).	
2	Perpusnas RI	2 Desember 2021 RDP dengan Agenda Realisasi APBN TA 2021	Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian Perpusnas RI atas realisasi anggaran pada APBN TA 2021 per 30 November 2021 mencapai 93,56 %,	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			atau sebesar Rp. 528.897.142.809 dari pagu sebesar Rp. 565.285.069.000	
		3-5 Desember 2021 Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke: 1. Kota Cimahi 2. Kota Serang 3. Kabupaten Brebes Agenda utama: pengawasan implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	1. Secara umum ditemukan, pengelolaan perpustakaan berbasis inklusi sosial selama pandemi covid-19 tidak berjalan. Namun dalam 3 bulan terakhir mulai aktif dan bergerak. 2. Dukungan CSR di daerah sangat terbatas dalam penyelenggaraan perpustakaan berbasis inklusi sosial.	
3	Kemenparekraf/Baparek raf RI	1 Desember 2021 RDPU Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik dengan pakar	Masukan pakar antara lain: 1. Perlunya desk khusus atau tim nasional yang mengoordinasikan lintas K/L yang memiliki anggaran dan program bidang pariwisata	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Pengelolaan dan penyelenggaraan desa wisata dan kampung tematik tidak boleh menghilangkan tradisi lokal dan budaya setempat	
		9 Desember 2021 Raker dengan agenda realisasi APBN TA 2021	Kemenparekraf/Baparekraf RI menyampaikan bahwa dari pagu sebesar Rp3.561.380.582.000 realisasi pembayaran sampai dengan tanggal 7 desember 2021 sebesar 70.07 % atau Rp2.495.303.397.167 sedangkan realisasi fisik sebesar 86.53% atau Rp3.081.838.651.698 Berdasarkan hal tersebut, Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memastikan target realisasi pada akhir Desember 2021 sebesar	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			93.36% atau Rp3.324.734.639.546 dapat tercapai.	
4	Kemenpora RI	2 Desember 2021 Raker dengan agenda realisasi APBN TA 2021	Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk memastikan daya serap anggaran APBN TA 2021 dengan target sebesar 97%, tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas anggaran, mengingat per 1 Desember 2021 baru mencapai 83,48% atau sebesar Rp2.228.397.819.723,- dari pagu sebesar Rp 2.669.304.730.000,-.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1	Badan Legislasi	1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan ketiga Tahun 2020-2024 (06 Desember 2021, pukul 13.00 WIB). 2. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah dan PPUU DPD RI dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2022 (06 Desember 2021, pukul 16.00 WIB). 3. Rapat Kerja Badan Legislasi dan Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan ketiga Tahun 2020-2024 (06 Desember 2021, pukul 19.30 WIB). 4. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (08 Desember 2021, pukul 10.00 WIB). 5. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (08 Desember 2021, pukul 14.00 WIB). 6. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan dan pembahasan perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (09 Desember 2021, pukul 10.00 WIB). 7. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (09 Desember 2021, pukul 11.00 WIB). 8. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan keputusan hasil Penyusunan dan Pembahasan perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (09 Desember 2021, pukul 15.00 WIB). 9. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (MINERBA), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Direktur Utama Pertamina dalam rangka mendengarkan pandangan/masukan terkait harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (14 Desember 2021, pukul 13.00 WIB).

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	BKSAP - KSI	26 November – 1 Desember 2021 – 143rd Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings, Madrid, Spanyol Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dipimpin Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI dan didampingi oleh Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP menghadiri persidangan <i>143rd IPU Assembly</i> di Madrid Spanyol. Tema umum persidangan kali ini adalah „<i>Contemporary Challenges to Democracy: Overcoming division and building community</i>“. Anggota delegasi yang hadir antara lain: Dr. (H.C.) Puan Maharani (F-PDIP), Dr. Fadli Zon (F-Gerindra), Charles Honoris (F-PDIP), Putu Supadma Rudana (P-PD), Dr. Mardani Ali Serah (F-PKS), Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), Puteri Anetta Komarudin (F-PG), dan Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD). Dr. Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI dan Damayanti, Deputi Bidang Persidangan juga hadir mewakili Indonesia di persidangan Association of Secretary-General of Parliaments (ASGP). Anggota parlemen Indonesia tercatat sebagai anggota beberapa organ penting IPU, seperti <i>Governing Council</i> (Dr. (H.C.) Puan Maharani, Dr. Fadli Zon, dan Charles Honoris), <i>Standing Committee on Democracy and Human Rights</i> (Dr. Fadli Zon), dan <i>Bureau of Women Parliamentarian</i> (Puteri Anetta Komarudin). Pada persidangan <i>Standing Committee on Democracy and Human Right</i> delegasi DPR RI berperan dalam memperjuangkan diadopsinya resolusi yang berjudul <i>Legislation worldwide to combat online child sexual exploitation</i>“ sebagai bentuk komitmen DPR RI terhadap perlindungan terhadap kekerasan seksual, khususnya kepada anak-anak. Selain itu DPR RI juga mengajukan <i>Emergency Item</i> pada General Assembly yang bertema „<i>Global parliamentary support for the humanitarian situation of the Palestinians</i>“, walaupun pada akhirnya menarik diri untuk mendukung resolusi yang diajukan negara-negara Afrika terkait

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		keadilan distribusi vaksin. Hal ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam membangun solidaritas global dalam penanganan Covid-19.
	BKSAP - KSB	1 Desember 2021 – Working Lunch GKSB DPR RI – Parlemen Korsel dengan Dubes Korea Selatan, H.E. Mr. Park Tae Sung GKSB DPR RI – Parlemen Korea Selatan mengadakan acara working lunch dengan Dubes Korea Selatan, H.E. Mr. Park Tae Sung pada Rabu, 1 Desember 2021. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua GKSB, Edward Tannur (F-PKB) beserta Anggota GKSB Sri Wulan (F-PNasdem) dan Desy Ratnasari (F-PAN). Sementara dari Embassy hadir pula Mr. Yoon Sungmin (Atase Legislatif) dan Mr. Lee Joonsan (Atase Kehutanan). Dalam acara tersebut Ketua dan Anggota GKSB menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan Dubes beserta jajarannya dalam kunjungan GKSB ke Korsel beberapa waktu yang lalu. Kunjungan tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari kunjungan tersebut antara lain perlunya upaya peningkatan kerjasama antara kedua parlemen, peningkatan kerjasama ekonomi, kerjasama pertanian maupun di bidang kebudayaan. Indonesia perlu mencontoh Korea Selatan dalam pengembangan produk pertanian dengan penggunaan teknologi yang sudah maju. Di bidang kebudayaan, industry K-Pop Korea juga perlu dicontoh, sehingga kebudayaan Korea dapat mempengaruhi dunia secara global, baik dari seni musik, drama, makanan, sampai pakaian. Dubes menekankan perlunya menanamkan kecintaan pada tradisi dan nilai-nilai luhur bangsa Korea kepada generasi muda, sehingga dimanapun mereka berada tetap menjunjung tinggi tradisi tersebut. Pemerintah Korea memberikan kebebasan kepada para pelaku seni/industri kreatif untuk berkarya dan memberikan dukungan, sehingga hasilnya mereka dapat berkembang dengan baik.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Untuk mempererat hubungan kerjasama antar parlemen Dubes menyampaikan rencana kunjungan Ketua Parlemen Korsel ke Indonesia pada akhir Desember ini, dan berharap GKSB Korsel dapat ikut mendampingi apabila delegasi tersebut diterima oleh Ketua DPR RI.
	BKSAP – KSB	3 Desember 2021 – BKSAP SDGs Day Pamulang BKSAP DPR RI menyelenggarakan kegiatan BKSAP Day yang bertemakan “Optimalisasi Peran Parlemen dalam Diplomasi Soft Power melalui Dunia Pendidikan” di Universitas Pamulang (UNPAM), Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Jumat (03/12/2021). Diplomasi Parlemen yang dilakukan oleh BKSAP DPR RI memiliki potensi sebagai konektor dan fasilitator antara potensi pendidikan yang dimiliki oleh kampus nasional dengan kampus internasional, baik pada saat menghadiri sidang – sidang internasional.
	BKSAP - KSI	5 – 7 Desember 2021 – Kunjungan Kerja Panja SDGs BKSAP DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara Delegasi BKSAP DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka melihat dan melakukan evaluasi sejauh mana pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Sulawesi Utara. Delegasi ini dipimpin oleh Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua BKSAP (F-PDIP). Anggota Delegasi antara lain: Efendi Sianipar (F-PDIP), I Made Urip (F-PDIP), Singgih Januratomoko (F-PG), Ichsan Firdaus (F-PG), Syaikhul Islam (F-PKB), Arzeti Bilbina Setyawan (F-PKB), Heru Widodo (F-PKB), Muslim (F-PD), Sakinah Al Jufri (F-PKS), Primus Yustisio (F-PAN), dan Ema Ummiyatul Chusnah (F-PPP). Pada kesempatan kali ini Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey memaparkan beberapa kemajuan di provinsi tersebut, antara lain: 1). Diselenggarakannya Bunaken Festival, 2). Likupang Tourism Festival, 3). pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8.4 persen pada semester ketiga tahun 2021, 4). Penyebaran Covid-19 yang relatif terkendali, walaupun PPKM yang diberlakukan tidak seketat di Pulau Jawa, 5). Pembangunan <i>Food Estate</i> masih

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		dilanjutkan dengan beberapa HGU memasuki masa kadaluarsa, pembatasan juga dilakukan jika dirasa berbenturan dengan tanah garapan masyarakat, 6). Pembangunan KEK Likupang dan KEK Bitung, dimana infrastruktur sedang disiapkan. Beberapa masalah yang muncul adalah keterbatasan jumlah dokter. Sihar Sitorus menyoroti HGU yang sudah habis masa berlakunya, hal ini penting untuk memastikan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua BKSAP juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam mendukung investasi di Sulawesi Utara. Selain itu, dari berbagai <i>goals</i> TPB yang sudah dipresentasikan, dari 17 <i>goals</i>, 14 sudah dibahas, hanya saja DPR RI masih menunggu hasil yang nyata, yaitu berkurangnya angka kemiskinan, kesenjangan sosial, dan akses rakyat terhadap lahan sebagai sumber mata percaharian. Anggota DPR RI lainnya juga menyoroti beberapa isu seperti: pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang tetap baik di kala pandemi, kemajuan KEK Likupang, isu akses perempuan kepada ekonomi, dan kontribusi perekonomian Sulawesi Utara kepada perekonomian global.
	BKSAP - ABA	5 – 11 Desember 2021 – Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Turki Delegasi Kunjungan Kerja Perorangan ke Turki terdiri dari: H. Desmon J. Mahesa, SH. MH.(F-PGerindra), Obon Tabroni (F-PGerindra), R. Imron Amin, SH., MH (F-PGerindra), M. Husni, SE., MM (F-PGerindra), Sudewo, ST., MT (F-PGerindra), Rahmat Muhajirin, SH (F-PGerindra), Habiburokhman SH., MH (F-PGerindra) mengadakan pertemuan dengan KBRI Turki, Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki; Kementerian Energi dan SDA Turki; Badan Penyelenggara Pemilu Turki; Pimpinan Keadilan dan Pembangunan (AKP) Turki; Pimpinan Partai Rakyat Republik; serta meninjau beberapa program pembangunan energi terbarukan di Turki. Tujuan Kunjungan:

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		1. Mencari contoh, belajar dari pengalaman atau melakukan perbandingan terhadap perencanaan, kebijakan strategi, pembiayaan, kerjasama pemerintah dan swasta maupun pengaturan yang terkait Pemilu, Partai Politik, Pembangunan infrastruktur pertanian dan pembangunan energi terbarukan. 2. Menjalin hubungan baik dengan Pemerintah, Parlemen, Partai Politik serta pihak – pihak lainnya di negara tujuan. 3. Membuka akses kemungkinan untuk bekerjasama dalam bidang pembangunan infrastruktur, pertanian dan pembangunan energi terbarukan dengan Pemerintah maupun pihak swasta di negara tujuan.
	BKSAP	7 Desember 2021 – Sharing Session oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI kepada peserta Kampus Merdeka Wakil Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera menerima mahasiswa program magang kampus merdeka yang saat ini melakukan magang di BKSAP. Dalam kesempatan tersebut para mahasiswa berkesempatan untuk berdiskusi dengan Pimpinan BKSAP terkait berbagai hal, antara lain mekanisme dalam sidang Internasional seperti IPU yang baru – baru ini diikuti oleh delegasi BKSAP DPR RI, terkait berbagai isu bilateral yang saat ini sedang menjadi perbincangan dunia, dan berbagai upaya peningkatan hubungan antar parlemen dengan berbagai negara sahabat. Dengan magang di BKSAP diharapkan para mahasiswa merasakan pengalaman dan menambah wawasan tentang diplomasi parlemen yang dijalankan oleh BKSAP DPR RI.
	BKSAP - ABA	7 – 13 Desember 2021 – Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Ekuador Delegasi Kunjungan Perorangan ke Ekuador, terdiri dari: H. John Kenedy Azis, SH., MH (F-PG), Prof. Dr. Zainudin Maliki, M. Si (F-PNasdem), Rudi Hartono Bangun, SE., M. AP (F-PNasdem), Hj. Sri Wulan, SE., MM (F-PNasdem), Drs. H. Achmad, M.Si (F-PD), Dr. H.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Syamsurizal., SE., MM (F-PPP) mengadakan pertemuan dengan KBRI di Ekuador, Parlemen Ekuador, Badan Sosial Ekuador, stakeholders terkait dan WNI di sekitar Quito Ekuador. Tujuan Kunjungan: 1. Mengetahui perumusan kebijakan terkait kegiatan bersosialisasi dan kegiatan spiritual/agama di masa Pandemi Covid-19 di Ekuador. 2. Sistem peningkatan kesejahteraan sosial budaya dan agama di Ekuador untuk menjadi bahan pertimbangan dilaksanakan di Indonesia.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	BKSAP - KSI	9 – 10 Desember 2021 – the 16th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference, Istanbul Turki Delegasi Parlemen Indonesia yang terdiri atas Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP (F-Gerindra), Putu Supadma Rudana (F-Partai Demokrat), Mardani Ali Serah (F-PKS), Achmad Hafidz Tohir (F-PAN), Himmatul Aliyah (F-Gerindra), dan Jazuli Juwaini (F-PKS) menghadiri sidang ke-16 PUIC Conference di Istanbul, Turki pada tanggal 9 – 10 Desember 2021. Sidang kali ini mengambil tema “<i>Sharing, Conscience, and Islam: Palestine, Migration, and Afghanistan</i>”. Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI menyatakan bahwa sebagian besar umat Islam dunia masih didera dan menderita berbagai masalah multidimensi, seperti konflik berkepanjangan, krisis politik, kemiskinan, penurunan kualitas Pendidikan, degradasi lingkungan dan masalah iklim, terorisme, bencana alam, bencana kemanusiaan, demokrasi yang lemah, dan dampak Covid-19. Ketua BKSAP juga juga menyoroti masalah kemanusiaan di Palestina, Afghanistan, dan Uighur dalam pidatonya. Terkait Palestina, Ketua BKSAP menyoroti pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel, terutama terus dilakukannya pembangunan pemukiman Yahudi secara illegal di Tepi Barat. Afghanistan juga mengalami permasalahan kemanusiaan akibat peralihan kekuasaan kepada Taliban, yang berpotensi mendorong arus pengungsi besar, yang tentu saja akan menimbulkan permasalahan baru. Muslim Uighur juga telah lama menjadi sasaran diskriminasi budaya, agama, dan ekonomi dari Pemerintah China. Terkait semua permasalahan ini, Ketua BKSAP mendorong kerja sama dan solidaritas internasional khususnya dari dunia Islam untuk mencari solusinya. Dr. Fadli Zon, didaulat sebagai Rapporteur pada pertemuan <i>Executive Committee</i> dan pada kesempatan itu beliau menyampaikan ajakan untuk hadir pada Sidang Umum IPU-144 yang akan diselenggarakan di Bali pada Maret 2022.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	BKSAP - KSB	13 Desember 2021 – BKSAP DPR RI menyelenggarakan pertemuan dengan Kemlu RI terkait Prioritas Kebijakan Luar Negeri RI 2022 dan Update Perkembangan Isu – Isu Internasional. BKSAP DPR RI mengadakan acara pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri RI pada 13 Desember 2021 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi parlemen dengan melibatkan Pemda Tangsel dan civitas akademika. Dalam acara tersebut dibahas Prioritas Kebijakan Luar Negeri RI 2022 dan Update Perkembangan Isu – isu internasional. Acara dibuka oleh Wakil Ketua BKSAP, Sihar Sitorus (F-PDIP) dan dipandu oleh Johan Budi S. Pribowo serta dihadiri para Kapoksi dan Anggota BKSAP. Hadir sebagai narasumber Dirjen Multilateral, Direktur Timur Tengah, Direktur Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan. Disampaikan bahwa di tahun 2022, isu strategis yang menjadi fokus diplomasi RI masih sejalan dengan fokus diplomasi 2021. Dengan beberapa refocusing yaitu: (1) perlindungan terhadap WNI, (2) berkoordinasi mengelola pandemi (tata kelola kesehatan global dan infrastruktur serta dampak sosial ekonomi), dan (3) berkontribusi bagi stabilitas dan keamanan dunia yang merupakan amanah konstitusi. Dibahas pula berbagai perkembangan isu internasional yang masih menjadi sorotan seperti penanganan pandemi Covid-19, peran Indonesia di kawasan ASEAN terutama dalam menyikapi konflik di Myanmar dan eskalasi di LCS, serta berbagai isu lainnya. Wakil Walikota Tangsel berharap agar potensi daerah dapat dibantu untuk dipromosikan dalam pelaksanaan diplomasi dengan negara lain, seperti program kerjasama sister city maupun promosi daerah di berbagai forum internasional. Diharapkan peran parlemen dalam melaksanakan diplomasi parlemen dapat terus ditingkatkan dan Kemlu akan siap untuk bekerjasama.

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	BKSAP - KSR	13 -15 Desember 2021 – 29th Asia Pacific Parliamentary Partnership Forum (APPF-29) Anggota BKSAP yang dipimpin I Gusti Agung Rai Wirajaya SE., MM (F-PDIP), selaku ketua delegasi, bersama Linda Megawati, SE., M.Si (F-PD), Arzeti Blibina, SE., M.A.P (F-PKB), Drs. Fathan (F-PKB), dan Heru Widodo, S.Psi (F-PKB) menghadiri rangkaian pertemuan tahunan the 29th Asia Pacific Parliamentary Partnership Forum (APPF-29) secara virtual pada, 13-15 Desember 2021. Sidang tahun ini mengangkat tema, “The Role of Parliaments in Strengthening Resilience in the Post-Covid-19” dan dihadiri oleh 110 Anggota Parlemen dari 21 negara anggota APPF. Sidang membahas topik-topik di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, kerjasama regional di kawasan Asia-Pasifik dan Anggota Parlemen Perempuan yang sebelumnya telah menghasilkan beberapa Draft Resolusi pada rangkaian Sidang Working Group, Executive Committee dan Drafting Committee pada 8-11 November 2021. Sidang APPF29 menghasilkan 13 (tiga belas) Draft Resolusi, yaitu: <u>Topik Women Parliamentarians</u> (1) Resolution on Promoting Gender-Sensitive Covid-19 Response and Post-Pandemic Recovery serta (2) Resolution on Achieving Gender Equality by Increasing Women’s Participation And Representation <u>Topik Political and Security matters;</u> (1) Resolution on Parliamentary Leadership for Peace and Security in The Asia Pacific And Beyond, (2) Resolution on Strengthening Regional Multilateralism and Addressing Issues Based On Generally Accepted Rules, (3) Resolution on Promoting People-Centered Cooperation by Guaranteeing Human Security, (4) Resolution on Peace on The Korean Peninsula,

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Resolution on Countering Terrorism and Violent Extremism In The Asia-Pacific Region <u>Topik Economic and Trade Matters</u> (1) Resolution on International Cooperation for Greater Economic Resilience and Inclusive Growth After the Covid-19 Crisis, (2) Resolution on Accelerating Digital Economy and Enhancing Connectivity, dan (3) Resolution on Enhancing Economic Integration and Promoting Trade in The Region <u>Topik Kerjasama Regional di Kawasan Asia-Pasifik</u> (1) Resolution on The Role of Parliaments in Balancing Disease Control, Economy, and Human Rights, And Ideas for Inter-Parliamentary Cooperation, (2) Resolution on Joint Parliamentary Action in Pursuing Response to Climate Change and For Sustainable Development dan (3) Resolution on Improving Understanding of Cultural Diversity in The Asia-Pacific Rangkaian Sidang APPF yang dilaksanakan pada 13-15 Desember ini terdiri dari Sidang Women Parliamentarians, Drafting Committee dan tiga Plenary Session yang akan mengadopsi Draft-draft Resolusi dan Joint Communique.

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	JUDUL	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1.		- Kunjungan Kerja Dalam Negeri	Mahkamah Kehormatan Dewan telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ke Kabupaten Subang, Jawa Barat. dalam rangka Sosialisasi Tugas dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Anggota DPR RI	
		- Paket Meeting	Kegiatan Paket Meeting pada tanggal 28 – 30 November 2021 dalam rangka Manajemen Penegakan Etika Kelembagaan dan tanggal 3 – 5 Desember 2021 dalam rangka	Kegiatan tersebut Mahkamah Kehormatan Dewan mengundang Rahmat Ferdian Andi, S.H.I., MH dan Yadi Surya Diputra, S.Sos., M.A. sebagai Narasumber

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	25-27 Nopember 2021 1. Kunjungan kerja ke Bandara Internasional Pattimura, Ambon dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan. 2. Kunjungan Kerja ke rumah sakit Siloam Ambon, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	---	
2.	28-30 Nopember 2021 1. Kunjungan kerja ke Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan. 2. Kunjungan Kerja ke rumah sakit Hermina Manado, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	---	
3.	1-3 Desember 2021 1. Kunjungan kerja ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan. 2. Kunjungan Kerja ke rumah sakit Hermina Makassar, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	---	
4.	4-6 Desember 2021 1. Kunjungan kerja ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian, Balikpapan dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan.	---	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
	2. Kunjungan Kerja ke rumah sakit Medika Utama Manggar Balikpapan, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.		
5.	7-9 Desember 2021 1. Kunjungan kerja ke Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarmasin dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan. 2. Kunjungan Kerja ke rumah sakit Ciputra Mitra Banjarmasin, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	---	
6.	10-12 Desember 2021 Kunjungan Kerja ke rumah sakit Primaya Pasa Kemis Tangerang dan rumah sakit Rumah Indonesia Sehat (RIS) Hospital Tangerang Selatan, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	---	
7.	13-15 Desember 2021 1. Kunjungan kerja ke Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan. 2. Kunjungan Kerja ke rumah sakit Hermina Palembang, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	---	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. KBRI di Nairobi, Negara Kenya; b. <i>Public Accounts Committee (PAC) of Kenya</i> ; c. <i>The Office Auditor General (OAG) of Kenya</i>	Kunjungan Kerja Luar Negeri.	BAKN DPR RI melakukan kegiatan kunjungan kerja luar negeri dalam rangka diplomasi parlemen dan mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja <i>Public Accounts Committee (PAC) dan The Office Auditor General (OAG) of Kenya</i> .	Pelaksanaan tgl 27 Nov s.d. 03 Des 2021
2.	a. KBRI di Bern, Negara Swiss; b. <i>Supervisory Committees in the Swiss Parliament</i> ; c. <i>Swiss Federal Audit Office</i> .	Kunjungan Kerja Luar Negeri.	BAKN DPR RI melakukan kegiatan kunjungan kerja luar negeri dalam rangka diplomasi parlemen dan mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja <i>Supervisory Committees in the Swiss Parliament</i> dan kantor Audit Federal Swiss (<i>Swiss Federal Audit Office</i>).	Pelaksanaan tgl 05 sd. 11 Desember 2021
